PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

PANITIA SELEKSI DAERAH

Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo

PENGUMUMAN

Nomor : P/810/064/PANSELDA/VIII/2024

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat di tahun 2024 ini, dengan berdasarkan dan berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 tahun 2024 tentang Mekanisme Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, dan
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;

Memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat dengan ketentuan sebagai berikut :

A. ALOKASI FORMASI

Untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Muna Barat mengalokasikan formasi CPNS sebanyak **260 formasi**, dengan rincian formasi jabatan sebagaimana terlampir.

B. JENIS FORMASI

Jenis formasi yang dibuka adalah formasi umum yang diperuntukan bagi pelamar umum dan pada formasi jabatan tertentu dapat dilamar penyandang disabilitas/kebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik dengan kriteria :

1. Mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;

2. Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
3. Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda.

C. PERSYARATAN PELAMARAN

1. Persyaratan Umum

a) Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar, kecuali untuk dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis usia pelamar paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;

c) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

d) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

e) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS aktif, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

g) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

h) Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

i) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

j) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas ke instansi lain dengan alasan apapun paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

k) Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

l) Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang telah dicabut status badan hukumnya;

m) Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya;

n) Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon Aparatur Sipil Negara sebelumnya;

o) Tidak berstatus sebegai peserta lulus seleksi calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan/penetapan NIP/NI CASN;

p) Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

2. Persyaratan Khusus

a) Calon pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri serta memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dan bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;

b) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan surat tanda registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar dan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;

c) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jabatan Polisi Pamong Praja (jenjang Pemula dan Ahli Pertama), wajib melampirkan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pemerintah (berstatus ASN) yang bekerja pada RSUD Pemerintah Kab. Muna Barat;

d) Untuk penyandang disabilitas dapat mengajukan lamaran dengan ketentuan sebagai berikut:

   1) Melamar pada jabatan khusus untuk formasi penyandang disabilitas, dan pada saat melamar wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas.

   2) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis/derajat kedisabilitasannya dan menggunggah link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;

e) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS dengan ketentuan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang berwenang;

f) Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan yang sudah dikelompokan oleh instansi, wajib mengunggah/mengupload dokumen sesuai yang dipersyaratkan.

D. TATA CARA PENDAFTARAN

a) Seluruh pelamar melakukan pendaftaran secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id;

b) Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online*;

c) Dalam melakukan pendaftaran, pelamar terlebih dahulu harus membuat akun pada laman https://sscasn.bkn.go.id sesuai tata cara yang tertera pada laman dimaksud;

d) Pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;

e) Setelah mencetak kartu informasi akun sistem seleksi calon ASN 2024, pelamar melakukan *login* ke laman https://sscasn.bkn.go.id dengan NIK dan password yang telah didaftarkan;

f) Pelamar melengkapi biodata, memilih jenis seleksi, memilih instansi, dan jabatan yang akan dilamar. Pastikan bahwa instansi yang dipilih adalah pemerintah daerah sesuai formasi yang dituju, karena setiap pelamar hanya diperkenankan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan;

g) Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi daerah dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan CPNS atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dinyatakan gugur;

h) Pelamar wajib mengunggah hasil **scan berwarna dokumen asli** persyaratan meliputi:

   1) Surat pernyataan 5 (lima) poin diketik komputer menggunakan kertas HVS ukuran folio dalam 1 (satu) halaman yang telah ditandatangani serta dibubuhi E-Materai sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman, dalam format PDF maksimal 1.000 kb;

   2) Surat lamaran diketik komputer menggunakan kertas HVS ukuran folio dalam 1 (satu) halaman yang telah ditandatangani serta dibubuhi E-Materai sesuai contoh format sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman, dalam format PDF maksimal 1.000 kb;

   3) KTP elektronik (e-KTP) atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam format JPG maksimal 500 kb;

   4) Sertifikat atau tangkapan layar (screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dalam format PDF maksimal 1.000 kb;

   5) Ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan formasi jabatan yang dilamar (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan) dalam format PDF maksimal 1.000 kb;

6) Transkrip Nilai pendidikan terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dan formasi jabatan yang dilamar (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan) dalam format PDF maksimal 1.000 kb;

7) Pasfoto terbaru berpakaian formal latar belakang warna merah dengan pose setengah badan (bukan swafoto) jelas dan tidak miring dalam format JPG maksimal 500 kb;

8) Surat Tanda Registrasi (STR) bagi formasi Tenaga Kesehatan yang mempersyaratkan STR, yang masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi, dalam format PDF maksimal 1.000 kb;

9) Khusus untuk pelamar penyandang disabilitas wajib mengunggah dokumen asli sebagai tambahan persyaratan antara lain :

   a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkat jenis dan derajat kedisabilitasannya, dalam format PDF maksimal 1.000 kb;

   b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. pastikan bahwa tautan/link video tersebut dapat diakses oleh panitia.

E. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

1) Seleksi Administrasi

   Seleksi administrasi adalah pelaksanaan verifikasi dokumen lamaran yang telah diunggah pada SSCASN dan mencocokannya dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.

2) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

3) Seleksi Kmpetensi Bidang (SKB) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

4) Pengumuman Kelulusan

   Pengumuman kelulusan dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah (PANSELDA) berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

5) Pemberkasan Akhir

   Pemberkasan akhir adalah penelitian dokumen lamaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan guna proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Jadwal Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024, berikut adalah perkiraan jadwal seleksi CPNS Kabupaten Muna Barat:

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS T.A 2024 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman pasca sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dam Tempat SKD CPNS	9 s.d 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT oleh peserta seleksi	23 s.d 25 November 2024
18	Penarikan Data Final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dam Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025

26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 22 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP	22 Februari s.d 23 Maret 2025

*) Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan PANSELNAS.

G. LAIN-LAIN

1. Pengumuman pendaftaran seleksi pengadaan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dilakukan melalui laman http://sscasn.bkn.go.id serta pada laman website BKPSDM Muna Barat (http://bkpsdm.munabarat.go.id) dan pada berbagai platform media social instansi BKPSDM Kab. Muna Barat;
2. Pelamar wajib menggunakan **Materai Elektronik (E-Materai)** pada dokumen yang mempersyaratkan penggunaan materai, dan tidak diperkenankan menggunakan materai fisik;
3. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur;
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan calo/penipuan dan kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam peraturan perundang-undangan terkait seleksi penerimaan CPNS, apabila diketahui maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar serta merugikan peserta dan proses seleksi secara keseluruhan, panitia seleksi dapat membatalkan kelulusan serta menggugurkan yang bersangkutan;
6. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
7. Panitia Seleksi Daerah (PANSELDA) CASN Pemerintah Kabupaten Muna Barat tidak menerima berkas secara langsung maupun via pos. Seluruh rangkaian verifikasi berkas dilakukan secara online dengan melihat kesesuaian antara dokumen unggahan dan persyaratan sesuai ketentuan melalui laman https://verifikasi-sscasn.bkn.go.id;
8. Kelalaian serta ketidaktelitian peserta dalam membaca, memahami dan mengupload berkas pada proses tahapan seleksi sehingga menyebabkan

gugurnya peserta, menjadi tanggung jawab peserta itu sendiri dan tidak dapat ditoleransi;

9. Keputusan panitia seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
10. Layanan Informasi dan pengumuman dapat dilihat melalui website BKPSDM Kab. Muna Barat serta platform media sosial BKPSDM Kab. Muna Barat. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui halaman tersebut;
11. Pelayanan dan penjelasan terkait penerimaan CPNS di Kabupaten Muna Barat dapat menghubungi nomor kontak admin:

- Azkar Kumala Jaya Aruzi : 0823-9606-4957
- Yuli Adi Purnomo : 0818-0699-7662
- Nyoman Bajraning H.Y. : 0852-4156-1940
- Nirwansyah Purna Utama : 0852-5503-6802
- Faisal : 0853-4150-0091

pada setiap hari kerja mulai pukul 08.00 wita sampai pukul 16.00 WITA.

Informasi resmi terkait dengan proses penerimaan CPNS Kab. Muna Barat dapat dilihat melalui website https://sscasn.bkn.go.id dan https://bkpsdm.munabarat.go.id.

Laworo, 19 Agustus 2024

a.n BUPATI MUNA BARAT,
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
PANITIA SELEKSI CASN

L.M. HUSEIN TALI

CONTOH SURAT LAMARAN DIKETIK KOMPUTER MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL

MUNA BARAT,

KEPADA
YTH. BUPATI MUNA BARAT
DI-
MUNA BARAT

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

N A M A	:
TEMPAT TANGGAL LAHIR	:
JENIS KELAMIN	:
A G A M A	:
PENDIDIKAN TERAKHIR	:
A L A M A T	:
NOMOR TELPON / HP	:

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, AGAR DAPAT MENGIKUTI SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB. MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 DALAM JABATAN .....

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN MASING-MASING 1 (SATU) RANGKAP BERKAS SECARA ONLINE :

1. PAS FHOTO BERWARNA LATAR MERAH UKURAN 3x4;
2. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ATAU SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PEREKAMAN KEPENDUDUKAN;
3. SURAT LAMARAN YANG TELAH DIBUBUHI E-MATERAI;
4. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN YANG TELAH DIBUBUHI E-MATERAI;
5. SERTIFIKAT ATAU TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) PADA PDDIKTI / BAN-PT DARI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI PADA SAAT KELULUSAN;
6. IJAZAH PENDIDIKAN TERAKHIR;
7. TRANSKRIP NILAI AKADEMIK PENDIDIKAN TERAKHIR.

DEMIKIAN SURAT LAMARAN INI DIBUAT. ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DI KEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT. ATAS PERKENANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

BUBUHI
E- MATERAI

.....

CONTOH SURAT PERNYATAAN 5 POIN KETIK KOMPUTER

SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI
N AM A :
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :
PENDIDIKAN TERAKHIR :
JABATAN YANG DILAMAR :
JENIS KELAMIN :
A G A M A :
A L A M A T :
NOMOR HP/WA :

DENGAN INI MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA , BAHWA SAYA :

1. MEMILIKI INTEGRITAS YANG TINGGI TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA;
2. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA ATAU KASUS NARKOBA;
3. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CPNS/PNS/PPPK/ANGGOTA TNI/POLRI ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CPNS/PNS/PPPK/ANGGOTA TNI/POLRI/PEGAWAI BUMN/BUMD ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA;
4. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CPNS/PNS/CALON ANGGOTA TNI/POLRI SERTA ANGGOTA TNI/POLRI/SISWA SEKOLAH IKATAN DINAS PEMERINTAH;
5. BERSEDIA MENERIMA SEGALA KEPUTUSAN TIM PANSELDA CASN PEMERINTAH DAERAH KAB. MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 DAN TIDAK AKAN MENGGANGGU GUGAT.

DEMIKIAN PERNYATAAN INI DIBUAT DENGAN SESUNGGUHNYA, APABILA DI KEMUDIAN HARI DITEMUKAN DATA YANG TIDAK BENAR, MAKA SAYA MENERIMA KEPUTUSAN PANITIA MEMBATALKAN KEIKUTSERTAAN/KELULUSAN SAYA PADA SELEKSI CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KAB. MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024 DAN SAYA BERSEDIA DITUNTUT DIMUKA PENGADILAN SERTA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB. MUNA BARAT.

MUNA BARAT,
YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

BUBUHI
E- MATERAI

(.....)

Lampiran Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat

Tahun Anggaran 2024
Nomor : P/810/ 004 /PANSELDA/VIII/2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
1. Tenaga Kesehatan					
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**3**
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**3**
3	APOTEKER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
4	APOTEKER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS BERO	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
5	APOTEKER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**3**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
6	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**2**
7	BIDAN TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS MAROBEA	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
8	BIDAN TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS MAGINTI	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
9	BIDAN TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS TONDASI	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
10	BIDAN TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS KAMPOBALANO	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
11	BIDAN TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS LAILANGGA	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
12	BIDAN TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS PAJALA	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**2**
13	BIDAN TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**3**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
14	BIDAN TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS TIWORO TENGAH	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
15	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS LAWA	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
16	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS GUALI	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
17	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS SIDAMANGURA	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
18	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS TIKEP	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
19	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**5**
20	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
21	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**3**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
22	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS WUNA	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
23	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT | SEKSI GIZI	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
24	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**2**
25	PERAWAT AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**2**
26	PERAWAT TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS TIWORO TENGAH	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
27	PERAWAT TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**3**
28	PERAWAT TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS BARANGKA	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
29	PERAWAT TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS KOMBIKUNO	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
30	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
31	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**2**
32	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS LAWA	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
33	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
34	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**2**
35	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | BIDANG PELAYANAN KESEHATAN | SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**
36	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**2**
37	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS | PUSKESMAS TIWORO SELATAN	UMUM	*Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan mengacu pada SE Dirjen Nakes Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	**1**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
2. Tenaga Teknis					
1	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KETAHANAN PANGAN | BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 SOSIOLOGI - S-1 EKONOMI PERTANIAN - S-1 MANAJEMEN DAN BISNIS - S-1 AGRIBISNIS - S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 GIZI - S-1 GIZI MASYARAKAT - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN	**1**
2	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 TRANSPORTASI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PENDIDIKAN FISIKA - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 HUKUM - S-1 PETERNAKAN - S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - S-1 PENDIDIKAN SEJARAH - S-1 ILMU PERTANIAN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 AKUNTANSI - S-1 ARSITEKTUR	**1**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
3	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 EKONOMI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 SOSIOLOGI - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	**1**
4	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERTANIAN | BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - D-IV TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN - D-IV TEKNIK MESIN - S-1 MEKANISASI PERTANIAN - D-IV MEKANISASI PERTANIAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 TEKNIK MESIN	**1**
5	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERTANIAN | BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 KIMIA - S-1 ILMU PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK - D-IV PENYULUH PETERNAKAN - S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK - D-IV PETERNAKAN - S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN - S-1 INDUSTRI PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK - S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN - D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN - S-1 PRODUKSI PETERNAKAN	**1**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
6	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS SOSIAL | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	PENYANDANG DISABILITAS	S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 HUKUM SYARIAH	**1**
7	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG EKONOMI KREATIF	UMUM	S-1 KEWIRAUSAHAAN - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 PARIWISATA - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 KONSERVASI SENI	**3**
8	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN DAN PEMBENIHAN IKAN	UMUM	D-IV ANALIS KIMIA - D-IV AKUAKULTUR - D-IV LINGKUNGAN - D-IV AGRIBISNIS PERIKANAN - S-1 AKUAKULTUR - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 BUDIDAYA PERIKANAN - S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA - S-1 KIMIA - S-1 LINGKUNGAN - S-1 AGROBISNIS PERIKANAN - S-1 AGRIBISNIS PERIKANAN - S-1 ILMU PERIKANAN - S-1 BIOTEKNOLOGI - S-1 ANALIS KIMIA - S-1 TEKNOLOGI AKUAKULTUR - S-1 SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 SUMBER DAYA AKUATIK	**2**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
9	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA	UMUM	D-IV ANALIS KIMIA - D-IV BIOLOGI - D-IV AKUAKULTUR - D-IV BUDIDAYA PERAIRAN - D-IV AGROBISNIS PERIKANAN - D-IV BUDIDAYA PERIKANAN - D-IV AGRIBISNIS PERIKANAN - S-1 AKUAKULTUR - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 BUDIDAYA PERIKANAN - S-1 BIOLOGI - S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN - S-1 AGROBISNIS PERIKANAN - S-1 AGRIBISNIS PERIKANAN - S-1 ILMU PERIKANAN - S-1 BIOTEKNOLOGI - S-1 ANALIS KIMIA - S-1 TEKNOLOGI AKUAKULTUR - S-1 SAINS PERIKANAN	**2**
10	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUNA BARAT | BAGIAN LEGISLASI, HUKUM, DAN PENGKAJIAN	UMUM	S-1 HUKUM	**2**
11	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK	UMUM	S-1 HUKUM	**2**
12	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM	UMUM	S-1 HUKUM	**2**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
13	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PEMADAM KEBAKARAN | SEKSI PENGENDALIAN OPERASI PENYELAMATAN DAN PELATIHAN	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 GEOGRAFI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK KESELAMATAN KEBAKARAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	**2**
14	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	UMUM	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN - S-1 KLIMATOLOGI - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN BENCANA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 STATISTIKA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	**2**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
15	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	UMUM	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 PENDIDIKAN FISIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 FARMASI - S-1 KEPERAWATAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 BAHASA INGGRIS - S-1 PSIKOLOGI - S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 INFORMATIKA KESEHATAN - S-1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT - S-1 BAHASA DAN KEBUDAYAAN INDONESIA - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	**2**
16	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	UMUM	S-1 PENDIDIKAN FISIKA - S-1 HUKUM ISLAM - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	**2**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
17	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KETAHANAN PANGAN | BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	UMUM	S-1 GIZI MASYARAKAT - S-1 SOSIOLOGI PEDESAAN - S-1 EKONOMI PERTANIAN - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 GIZI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK PANGAN - S-1 ILMU GIZI - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS - S-1 MANAJEMEN DAN BISNIS - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA LINGKUNGAN	**2**
18	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KETAHANAN PANGAN | BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	UMUM	S-1 EKONOMI PERTANIAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU GIZI - S-1 AGRIBISNIS - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI PANGAN - S-1 ILMU PANGAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 KEAMANAN PANGAN	**2**
19	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KETAHANAN PANGAN | BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	UMUM	S-1 MANAJEMEN - S-1 GIZI - S-1 GIZI MASYARAKAT - S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN - S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK - S-1 EKONOMI PERTANIAN - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 MANAJEMEN DAN BISNIS - S-1 SOSIOLOGI - S-1 AGRIBISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	**1**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
20	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PERIZINAN DAN PENGELOLAAN TPI	UMUM	D-IV KELAUTAN - D-IV PERIKANAN - S-1 KELAUTAN - S-1 PERIKANAN	**2**
21	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERTANIAN | BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN	UMUM	S-1 EKONOMI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS - S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	**2**
22	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | BIDANG PERDAGANGAN	UMUM	S-1 EKONOMI - S-1 PETERNAKAN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 KIMIA - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 STATISTIKA - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 TEKNIK ELEKTRO	**1**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
23	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG PENGELOLAAN KEARSIPAN	UMUM	D-IV KEARSIPAN - S-1 PENDIDIKAN FISIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 EKONOMI - S-1 PETERNAKAN - S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN - S-1 AGRIBISNIS - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERKAPALAN - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 MANAJEMEN PENDIDIKAN - S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 KEARSIPAN - S-1 ILMU PERTANIAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	**4**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
24	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	UMUM	S-1 PETERNAKAN - S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 PENDIDIKAN FISIKA - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI KESEHATAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 ILMU PERTANIAN - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN SEJARAH - S-1 HUKUM - S-1 TRANSPORTASI - S-1 TEKNIK KIMIA	**3**
25	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN | BAGIAN ORGANISASI	UMUM	S-1 PSIKOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	**2**
26	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERTANIAN | BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	UMUM	PROFESI DOKTER HEWAN	**1**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
27	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG KEBUDAYAAN	UMUM	S-1 SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM - S-1 SENI PERTUNJUKAN - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 EKONOMI - S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 SENI MURNI - S-1 SENI RUPA - S-1 SENI TARI - S-1 SENI MUSIK - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ARKEOLOGI - S-1 SEJARAH - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 KRIYA SENI	**2**
28	PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BINA JASA DAN KONSTRUKSI | SEKSI BINA KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI	UMUM	D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV TEKNIK ELEKTRO - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 STUDI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR	**4**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
29	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERUMAHAN	UMUM	D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV PERENCANAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 ARSITEKTUR INTERIOR - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN - S-1 DESAIN INTERIOR - S-1 ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR - S-1 PERENCANAAN KOTA	**4**
30	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG PENATAAN RUANG | SEKSI PERENCANAAN PENATA RUANG	UMUM	S-1 TEKNIK TENAGA LISTRIK - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 PERENCANAAN KOTA	**2**
31	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BINA MARGA | SEKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN	UMUM	S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 PERENCANAAN KOTA	**3**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
32	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG BINA MARGA | SEKSI PEMBANGUNAN JALAN	UMUM	D-IV ARSITEKTUR - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 TEKNIK KELAUTAN - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK PLANOLOGI - S-1 GEOLOGI - S-1 PLANOLOGI - S-1 PERENCANAAN KOTA	**4**
33	PENATA KEPROTOKOLAN	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL	UMUM	S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	**3**
34	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERAMPIL	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERMUKIMAN	UMUM	D-III TEKNIK SIPIL - D-III TEKNIK MESIN	**1**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
35	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	UMUM	D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN - S-1 KLIMATOLOGI - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 MANAJEMEN BENCANA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOLOGI - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 GEOGRAFI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	**2**
36	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	UMUM	S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 HUKUM - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	**3**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
37	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG PENATAAN RUANG | SEKSI PEMANFAATAN RUANG	UMUM	D-IV GEOGRAFI - D-IV ARSITEKTUR - D-IV PLANOLOGI - D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	**3**
38	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERUMAHAN	UMUM	D-IV TEKNIK SIPIL - D-IV PERENCANAAN WILAYAH - S-1 PERENCANAAN WILAYAH - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK GEOMATIKA - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN - S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN	**3**
39	PENERA AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | UPT METROLOGI LEGAL	UMUM	S-1 MATEMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 FISIKA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK FISIKA - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 STATISTIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 TEKNIK INSTRUMENTASI DAN AUTOMASI	**2**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
40	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	UMUM	S-1 KEWIRAUSAHAAN - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	**2**
41	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERTANIAN | BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN	UMUM	S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN - D-IV TEKNIK MESIN - D-IV MEKANISASI PERTANIAN - S-1 MEKANISASI PERTANIAN - D-IV TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN - S-1 TEKNIK MESIN	**3**
42	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERTANIAN | BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	UMUM	D-IV PETERNAKAN - D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN - S-1 ILMU PETERNAKAN - S-1 PRODUKSI PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK - S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN - S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN	**5**
43	PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN | SEKSI FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN DAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	UMUM	S-1 FARMASI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT - S-1 SAINS DAN TEKNOLOGI FARMASI	**4**
44	PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KETAHANAN PANGAN | BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	UMUM	S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN PANGAN - S-1 FARMASI - S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	**4**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
45	PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | UPT METROLOGI LEGAL	UMUM	S-1 MATEMATIKA - S-1 KEHUTANAN - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 BIOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	**1**
46	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 MANAJEMEN PAJAK - S-1 AGRIBISNIS - S-1 PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI SYARIAH - S-1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM - S-1 USAHA KOPERASI	**3**
47	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERTANIAN | BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN	UMUM	D-IV PERTANIAN - D-IV PETERNAKAN - S-1 AGROBISNIS - D-IV AGRO BISNIS - D-IV TEKNOLOGI PRODUKSI PANGAN - S-1 EKONOMI PERTANIAN - S-1 PENYULUHAN PERTANIAN - S-1 PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN - S-1 ILMU TANAH - S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - S-1 PERKEBUNAN - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 AGROINDUSTRI - S-1 ILMU PANGAN	**4**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
48	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERTANIAN | BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	UMUM	S-1 TEKNOLOGI PAKAN TERNAK - S-1 TEKNOLOGI HASIL TERNAK - D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN - S-1 KIMIA - S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN - D-IV PENYULUH PETERNAKAN - S-1 ILMU PETERNAKAN - D-IV PETERNAKAN - S-1 INDUSTRI PETERNAKAN - S-1 PRODUKSI PETERNAKAN - S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK - S-1 BUDI DAYA PETERNAKAN	**4**
49	PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | BIDANG PERDAGANGAN	UMUM	S-1 MATEMATIKA - S-1 KEHUTANAN - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK KIMIA - S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	**2**
50	PENGELOLA KESEHATAN IKAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN DAN PEMBENIHAN IKAN	UMUM	D-IV AKUAKULTUR - S-1 KEDOKTERAN HEWAN - S-1 FARMASI - S-1 PERIKANAN - S-1 BUDIDAYA PERAIRAN - S-1 BUDIDAYA PERIKANAN - S-1 TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA - S-1 BIOKIMIA - S-1 LINGKUNGAN - S-1 TEKNOLOGI AKUAKULTUR - S-1 PERIKANAN BUDIDAYA	**2**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
51	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | BIDANG PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP	UMUM	S-1 PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 PERIKANAN - S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN - S-1 PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN - S-1 ILMU PERIKANAN - S-1 TEKNIK SISTEM PERKAPALAN	**1**
52	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG SUMBER DAYA AIR	UMUM	S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR - S-1 TEKNIK PENGAIRAN - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 GEOLOGI	**5**
53	PENGEMBANG KEWIRAUSAHAAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 PENYULUHAN PERTANIAN - S-1 EKONOMI - S-1 PETERNAKAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU PERIKANAN - S-1 SAINS PERTANIAN	**2**
54	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PENDIDIKAN DASAR | SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	UMUM	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S-1 PENDIDIKAN KOMPUTER - S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 PENDIDIKAN INFORMATIKA	**2**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
55	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN | BIDANG PERUMAHAN	UMUM	S-1 SANITASI LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	**2**
56	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI`	UMUM	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 PERIKANAN TANGKAP - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	**1**
57	PENILAI PEMERINTAH AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA | SUB BAGIAN KERJASAMA	UMUM	D-IV MANAJEMEN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK - D-IV MANAJEMEN ASET SEKTOR PUBLIK - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 KEHUTANAN - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 ILMU KELAUTAN - S-1 FISIKA - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PERKAPALAN - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 STATISTIKA - S-1 GEOLOGI - S-1 TEKNIK ELEKTRO - S-1 ILMU PERTANIAN	**2**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
58	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	UMUM	S-1 HUKUM	**2**
59	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM	UMUM	S-1 HUKUM	**3**
60	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERTANIAN | BIDANG PRASARANA, SARANA, DAN PENYULUHAN	UMUM	D-IV PENYULUH PERTANIAN - D-IV PETERNAKAN - D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA - S-1 AGRONOMI DAN HORTIKULTURA - S-1 AGROEKOTEKNOLOGI - S-1 PETERNAKAN - S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA - S-1 AGRONOMI - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS - S-1 PERKEBUNAN - S-1 AGRIBISNIS PETERNAKAN - S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK - S-1 MANAJEMEN PERTANIAN - S-1 PENYULUHAN PERKEBUNAN	**10**
61	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS SOSIAL | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	UMUM	S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 SOSIOLOGI	**3**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
62	PERENCANA AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ANGGARAN | SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA	UMUM	S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 EKONOMI BISNIS - S-1 EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM	**2**
63	PERENCANA AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ANGGARAN | SUB BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN	UMUM	S-1 PENDIDIKAN FISIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM ISLAM - S-1 EKONOMI BISNIS	**3**
64	PERENCANA AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI & PEMBANGUNAN DAERAH	UMUM	S-1 HUKUM ISLAM - S-1 MANAJEMEN - S-1 PSIKOLOGI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS	**2**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
65	PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUNA BARAT | BAGIAN LEGISLASI, HUKUM, DAN PENGKAJIAN	UMUM	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI SUMBER DAYA - S-1 EKONOMI - S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 MANAJEMEN - S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL - S-1 SASTRA INDONESIA - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 REKAYASA SISTEM INFORMASI	**2**
66	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ARSITEKTUR - S-1 TEKNIK LINGKUNGAN - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 HUKUM - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 HUKUM SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	**5**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
67	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT | SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	UMUM	SLTA/SMA SEDERAJAT - SMA IPA - PERSAMAAN SLTA (PAKET C) - SMA IPS - SLTA KEJURUAN - SMK - SMK TEKNIK	**10**
68	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | SUB BAGIAN PERENCANAAN, ASET DAN EVALUASI	UMUM	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	**1**
69	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | INSPEKTORAT | SEKRETARIAT INSPEKTORAT | SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN KEPEGAWAIAN	UMUM	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNIK ELEKTRO	**1**
70	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN | BAGIAN ORGANISASI	UMUM	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK ELEKTRO	**1**
71	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	UMUM	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNIK ELEKTRO	**2**
72	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	UMUM	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 TEKNIK ELEKTRO	**2**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
73	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG PENGELOLAAN KEARSIPAN	UMUM	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 TEKNIK ELEKTRO	**1**
74	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	UMUM	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 REKAYASA KOMPUTER	**2**
75	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA | SUB BAGIAN PERENCANAAN, ASET DAN EVALUASI	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTASI	**1**
76	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 TEKNIK ELEKTRO	**1**
77	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN | SUB BAGIAN KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	UMUM	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTASI - S-1 REKAYASA KOMPUTER	**2**
78	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SUB BAGIAN PERENCANAAN, ASET DAN EVALUASI	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER - S-1 TEKNIK ELEKTRO	**1**

No.	Nama Jabatan	Lokasi Penempatan	Jenis Formasi	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Kuota
79	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	UMUM	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 SAINS KOMPUTASI	1
80	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG PRASARANA | SEKSI PERENCANAAN PRASARANA	UMUM	D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER	1
81	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH | BIDANG TATA USAHA | SEKSI PERENCANAAN DAN PROGRAM	UMUM	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 REKAYASA KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK ELEKTRO	2
82	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN	UMUM	D-IV PERPUSTAKAAN DIGITAL - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN - S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI	2
83	SANDIMAN AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | BIDANG PERSANDIAN	UMUM	S-1 MATEMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	2
84	STATISTISI AHLI PERTAMA	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | BIDANG STATISTIK	UMUM	D-IV SAINS DATA TERAPAN - S-1 MATEMATIKA - S-1 STATISTIKA - S-1 STATISTIKA TERAPAN - S-1 SAINS DATA - S-1 SAINS DATA SPASIAL	3

a.n. BUPATI MUNA BARAT,
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
PANITIA SELEKSI CASN

L.M. HUSEIN TALI